



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS GADJAH MADA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SUPRIYADI
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN SISTEM INFORMASI
3. NHK : 639913

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 13.729.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 496 m<sup>2</sup>/420 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 4.976.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1248 m<sup>2</sup>/1020 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 8.240.000.000
3. Tanah Seluas 154 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 108.000.000
4. Tanah Seluas 1403 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 405.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 241.000.000

1. MOBIL, HONDA CITY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
2. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA ULTIMATE Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
3. MOTOR, VESPA REGULER Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 31.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 303.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 104.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.097.514.700**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----



Sub Total	Rp.	15.474.514.700
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	15.474.514.700

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.